

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 2007, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2020, Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum, Konpress, Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Cet 3), Bayumedia Publishing, Malang.
- M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, et al., 2019 Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, 2013, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

C. Jurnal

Andryan, 2018, Implikasi Putusan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 3.

Antoni Putra, 2020, Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1.

_____, 2021, Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang Undang Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 3.

Dixon Sanjaya, 2021, Pengujian Formil Undang Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Jurnal Hukum Adigama , Vol 4 No 2.

Farel Hasibuan, dkk, 2022, Implikasi Penerapan Putusan MK No. 91/PUUXVIII/2020 Terhadap Implementasi *Omnibus Law* Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3.

Hardyanto, 2014, Artikel Tesis, Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

I Gede Agus Kurniawan, 2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1.

Johansyah, 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Vol. 19, No. 2.

M. Laica Marzuki, 2003, Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 1, No. 3.

Malik, 2009, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Vol. 6 No. 1.

Meirina Fajarwati, 2017, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional, Kajian Vol. 22 No. 3.

Nia Hasna Triadi, Arfa'I, 2022, Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 2 No. 3.

R. Muhammad Mihradi, 2017, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu, Palar/Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 2.

Siti Partiah, 2021, Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Self Executing, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Volume 1, No. 1.

Sunarto, 2016, Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2.

Wicipto Setiadi, 2013, Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 3.

Puguh Windrawan, 2013, Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, *Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Website

Agus Sahbani, 2022, “*Jenis Putusan MK dalam Praktik Peradilan Konstitusi*”, dalam *Hukum Online*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-putusan-mk--lt62055c2421edf>.

Ayomi Amindoni, 2020, “*UU Cipta Kerja: Kesalahan ‘Fatal’ Pasal-Pasal Omnibus Law Akibat Proses Legislasi Ugal-Ugalan, Apakah UU Layak Dibatalkan?*”, dalam *BBC News Indonesia*,
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000>.

Panel Ahli: Proses Penerbitan Perppu Cipta Kerja Menabrak Konstitusi, Menunjukkan Karakter Otoritarianisme Pemerintah, 2023, *The Conversation*,
<https://theconversation.com/panel-ahli-proses-penerbitan-perppu-cipta-kerja-menabrak-konstitusi-menunjukkan-karakter-otoritarianisme-pemerintah-197135>.

Dosen UII Berikan Pandangan Mengenai Perppu Cipta Kerja, 2023,
<https://www.uii.ac.id/dosen-iii-berikan-pandangan-mengenai-perppu-cipta-kerja/>.